



## **PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DI DESA LEMBAR SELATAN**

### *THE LEGAL ASSISTANCE OF DRAFTING VILLAGE REGULATION OF MANGROVE ECO-TOURISM MANAGEMENT IN SOUTH LEMBAR VILLAGE*

**Diva Pitaloka, S.H., M.H.**

Universitas Mataram

Email : [divapitaloka@unram.ac.id](mailto:divapitaloka@unram.ac.id)

**Lalu Guna Nugraha**

Universitas Mataram

Email : [lgunanugraha@unram.ac.id](mailto:lgunanugraha@unram.ac.id)

**Ayu Riska Amalia**

Universitas Mataram

Email : [aramel@unram.ac.id](mailto:aramel@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.

**Kata Kunci : Mangrove, Peraturan Desa, Ekowisata**

#### **Abstract**

*Mangrove ecosystems that are utilised as ecotourism in Lembar Selatan Village need to be protected and managed in order to provide benefits for environmental and economic resilience of the community. In order for the implementation of mangrove ecotourism protection to run well and sustainably, community participation is needed in Lembar Selatan Village. In implementing the protection and sustainable use of mangrove ecotourism, it is necessary to form a Village regulation on Mangrove Ecotourism Management. Assistance in forming village regulations regarding mangrove management is needed.*

**Key word: Mangrove; village regulations; Ecotourism**

#### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan sosial ekonomi. Desa adalah basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila masalah sosial ekonomi di desa bisa teratasi maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan. Artinya, akar persoalan pembangunan di Indonesia ada di desa. Desa adalah sumber identifikasi

masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan tertinggi, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan juga rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibandingkan dengan kota. Karena itulah, memperbaiki pembangunan manusia, meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewujudkan Indonesia Maju, mulailah dari desa.<sup>1</sup>

Desa Lembar Selatan adalah salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Lembar Selatan merupakan pintu masuk menuju provinsi Nusa Tenggara Barat karena mempunyai kawasan Pelabuhan laut. Desa Lembar Selatan merupakan desa pemekaran dari Desa Lembar sejak tanggal 13 Juli 2010.<sup>2</sup>

Desa Lembar Selatan selain memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata (ekowisata) juga memiliki potensi hutan mangrove yang jika dikelola bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa jenis ekosistem vital di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang memiliki peran strategis baik secara ekologi, sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini salah satunya tercermin dari kompleksitasnya fungsi hutan mangrove, diantaranya ; 1). manfaat ekonomis diantaranya terdiri atas hasil berupa kayu (kayu bakar, arang, kayu konstruksi, dll.) dan hasil bukan kayu (hasil hutan ikutan dan pariwisata berbasis lingkungan/ekowisata), 2) manfaat ekologis.<sup>3</sup>

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove.

## **PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN**

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara cepat, salah satu program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah tingkat desa adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Masalah utama yang dihadapi banyak pemerintah desa di banyak tempat adalah kurangnya kapasitas untuk mengakses dan meningkatkan informasi. kualitas pelayanan karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi

---

1 Halim Iskandar , SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, hal. 9

2 Faozan Maulad, Laporan, Laporan Hasil : Kajian dan Perencanaan Partisipatoris Pengembangan Ekowisata Lembar Selata, halaman 11

3 Abd. Saddam Mujib, Laporan Hasil Survey Mangrove dan Hidro-Oseanografi Desa Lembar Selatan, halaman 1

sebagai lembaga pendidikan dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui konsultasi, pelatihan dan pendampingan.

Dengan adanya pendampingan pembuatan peraturan desa Masyarakat menjadi paham dan mengerti bagaimana tahapan yang akan dilaksanakan dalam membuat peraturan desa dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Adapun metode kegiatan yang digunakan dalam pendampingan pembuatan peraturan desa dalam pengelolaan ekowisata mangrove adalah Pemetaan Sumber Daya, melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang ada di kawasan ekowisata mangrove untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan, langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan masukan dan partisipasi dalam pembuatan peraturan desa Setelah peraturan desa berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan terhadap implementasi peraturan tersebut.

Target luaran yang hendak dicapai melalui pendampingan pembuatan peraturan desa ini adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar tentang tata cara pembentukan peraturan desa dalam pengelolaan ekowisata mangrove.

#### **PENDEKATAN / METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pendampingan pembuatan peraturan desa dilakukan dengan metode :

1. Pemetaan Sumber Daya, melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang ada di kawasan ekowisata mangrove untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan.
2. Ceramah yaitu Pemberian Materi tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa khususnya Peraturan tentang Pengelolaan ekowisata Mangrove di masyarakat Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Lombok Barat dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.
3. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Pendamping mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim pendamping.
4. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan ditemukan beberapa permasalahan dalam penyusunan peraturan desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar adalah sebagai berikut:

1. Sensitivitas terhadap permasalahan yang perlu diatur dalam peraturan desa belum dilaksanakan secara optimal
2. Pembuatan Peraturan desa tidak pernah melakukan kajian akademis bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun.

3. Keahlian dalam menyusun peraturan desa cenderung terkonsentrasi pada Kepala Desa dan Perangkat desa.

Terkait dengan adanya Kawasan ekowisata mangrove di desa Lembar Selatan diperlukan suatu aturan yang berupa peraturan Desa. Perlunya Peraturan Desa yang mengatur Kawasan tersebut untuk :

1. **Preservasi Ekosistem** Dengan adanya peraturan desa, dapat dilakukan pengawasan dan perlindungan terhadap ekosistem mangrove yang rentan terhadap kerusakan lingkungan.
2. **Peningkatan Pendapatan**, engan mengatur ekowisata mangrove, diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3. **Keberlanjutan Ekowisata**, Peraturan desa juga dapat mengarahkan pembangunan ekowisata mangrove menuju keberlanjutan yang lebih baik, tanpa merusak lingkungan.

## **HASIL KEGIATAN**

### **Analisis Evaluasi**

Dari evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat telah memahami pentingnya pendampingan dalam pembuatan peraturan desa seperti peraturan desa dalam pengelolaan ekowisata mangrove
2. Peran semua pihak di desa sangat penting sehingga peraturan desa yang dihasilkan di desa Lembar Selatan kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat menjadi berkualitas

### **Faktor-Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung kegiatan pendampingan pembuatan peraturan desa pengelolaan ekowisata mangrove:

1. **Antusiasme Kepala Desa, Perangkat dan staf Desa, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat** dalam mengikuti kegiatan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Pengelolaan Ekowisata Mangrove sangat tinggi. dari awal sampai akhir, dikarenakan hal ini sangat penting karena Desa Lembar Selatan mempunyai kawasan ekowisata Mangrove yang sangat perlu pengaturannya.
2. **Pemerintahan Desa Lembar Selatan** sangat terbuka dan responsive terkait kegiatan pendampingan pembuatan peraturan Desa sehingga banyak pengetahuan baru yang didapat.
3. **Sarana pendukung kegiatan pendampingan** tersedia di kantor Desa seperti ruang terbuka, sound system, Smart Tv dan ruangan yang representatif.

### **Faktor-Faktor Penghambat**

Disamping faktor-faktor pendorong di atas, ada juga faktor penghambat lainnya karena tidak semua Masyarakat yang diundang bisa hadir dalam pendampingn pembuatan

peraturan desa pengelolaan ekowisata mangrove disebabkan karena kesibukan masing masing warga masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pentingnya pendampingan dalam pembuatan peraturan-peraturan di Desa sehingga peraturan-peraturan desa yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di atasnya dan bermanfaat bagi Masyarakat di desa. Hendaknya kegiatan pendampingan pembuatan peraturan desa dilaksanakan secara berkesinambungan, serta melibatkan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan aturan-aturan yang akan dibuat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. Saddam Mujib, 2022, Laporan Hasil Survey Mangrove dan Hidro-Oseanografi Desa Lembar Selatan
- Bengen DG., 2002, *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Buku. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Direktorat Pesisir dan Lautan, 2012, *Profil Kegiatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, 2008, *Konvensi dan Kerjasama Internasional Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Kementerian Kehutanan
- Dauvergene, Peter, 2009, *Historical Dictionary of Environmentalism*, The Scarecrow Press, UK
- Esperiana, S. N. (2009). *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Depok
- Fandeli, C., 2000, *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husamah dan Atok M.H., 2018, Evaluation of the implementation of community-based ecotourism principles in management of clungup mangrove conservation, Sumbermanjing Wetan, Malang. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Vol. 8 No. 1. Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/15630>
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Kete, S. C. ,2016,. *Pengelolaan Ekowisata Berbasis Goa* Yogyakarta: Deepublish.
- Kiper, T. ,2013, . *Role of Ecotourism in Sustainable Development*. Turkey: Murat Ozyavuz. Retrieved from [www.intechopen.com](http://www.intechopen.com).
- Mahmud Marzuki.,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Nelson, James Gordon, 1997, *National Parks and Protected Areas: Keystones to Conservation and Sustainable Development*, Springer
- Philippe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge

University Press

- Ramsar Convention Secretariat, 2016, *An Introduction to The Convention on Wetlands*, Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland
- Tim BPHN, 2009, *Laporan akhir Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan*, Jakarta.
- TIES, 2014. The International Ecotourism Society. *Ecolodge*.
- Tuwo, A., 2011, *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan laut Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- UNESCO, 2009, *Ekowisata: Panduan dan Pelaksanaan*, UNESCO
- Wati, Mega Widya, 2017, *Strategi Pegelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Berdasarkan Preferensi Stakeholder*, Surabaya : ITS